

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

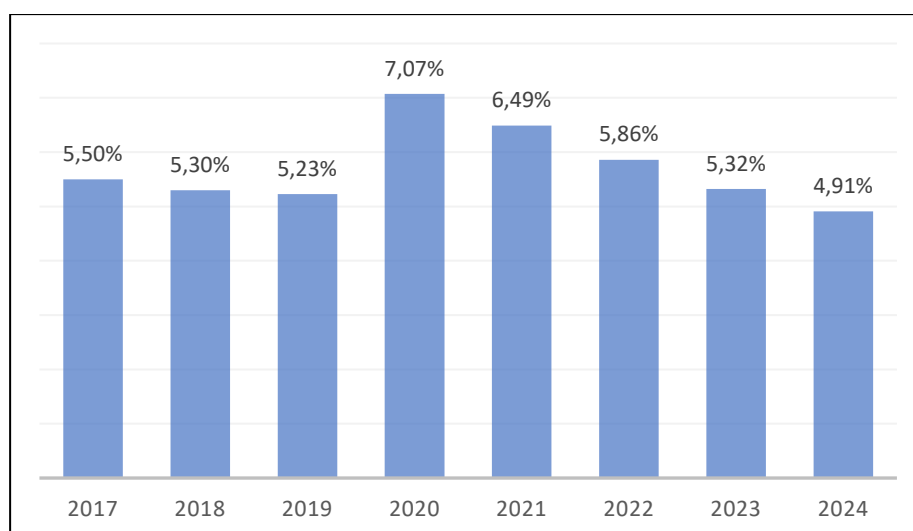
Pembangunan lingkup ekonomi menjadi aspek penting yang harus diutamakan oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Pembangunan dalam bidang ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di suatu wilayah. Namun dalam pelaksanaannya, setiap negara memiliki permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Salah satu permasalahan umum yang dialami di negara berkembang, termasuk Indonesia adalah pengangguran. Pengangguran merupakan permasalahan ekonomi makro yang berdampak langsung pada kehidupan manusia secara langsung dan tergolong sebagai isu yang serius. Oleh karena itu, tingkat pengangguran dapat digunakan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah.² Tingkat pengangguran juga menilai apakah kondisi perekonomian suatu negara saat ini sedang mengalami pertumbuhan, perlambatan bahkan kegagalan.

Tingginya tingkat pengangguran menjadi persoalan penting dalam sektor tenaga kerja di Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja baru berlangsung lebih cepat ketimbang peningkatan

² Alfinatus Suroya dan Rendra Erdkhadifa. "Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Angkatan Kerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022". *Jurnal EK&BI*, Vol. 6 No. 1. 2023. [doi:http://www.10.37600/ekbi.v6i1.793](http://www.10.37600/ekbi.v6i1.793), hlm. 192.

ketersediaan lapangan kerja, sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Ukuran untuk menilai tingkat pengangguran menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kondisi ketika seseorang berupaya mencari pekerjaan namun belum memperoleh pekerjaan yang sesuai disebut sebagai pengangguran terbuka.³ Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka adalah rasio dalam bentuk persentase yang menunjukkan proporsi pengangguran terhadap keseluruhan angkatan kerja.⁴

Grafik 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2017-2024



Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia 2025

Berdasarkan grafik tersebut, pada tahun 2017 sampai 2019 TPT menunjukkan tren penurunan hingga pada tahun 2020 mengalami peningkatan drastis yang dikarenakan terjadinya fenomena wabah COVID-

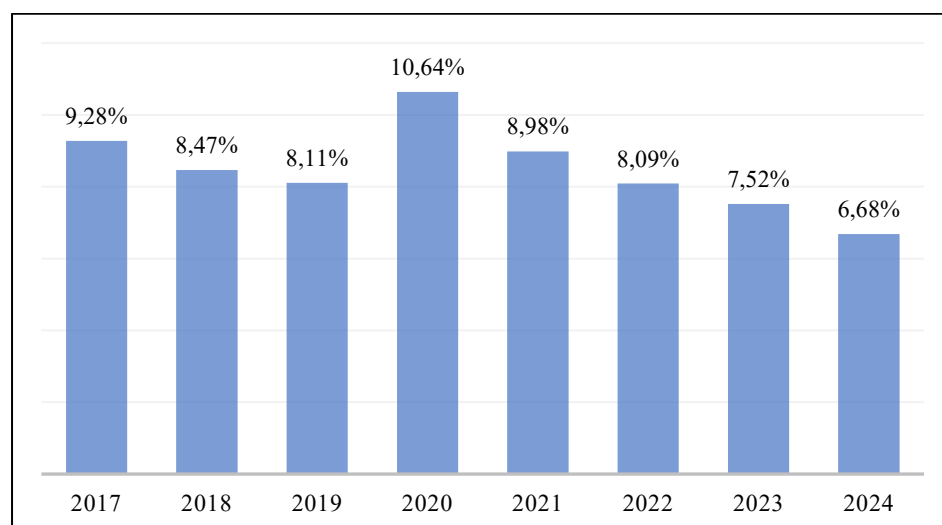
³ Zul Fadli, dkk., *Ekonomi Makro: Teori-Teori Pengantar* (CV. Gita Lentera, 2023), hlm.

⁴ BPS, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," 2020.

19 yang merebak Indonesia. Ketika memasuki tahun 2021, TPT mulai turun namun cukup tinggi di angka 6,49% karena proses pemulihan ekonomi secara bertahap dan banyak tenaga kerja belum terserap kembali ke pasar tenaga kerja. Hingga pada tahun 2022–2024 menunjukkan tren penurunan menjadi 4,91% yang merupakan angka terendah TPT.

Masalah pengangguran menjadi perhatian serius pada setiap wilayah di Indonesia. Provinsi Banten termasuk provinsi di Indonesia dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cukup tinggi.

Grafik 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten Tahun 2017-2024



Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2025

TPT tersebut menunjukkan angka persentase yang menurun meskipun pada tahun 2020 Provinsi Banten mencatatkan angka TPT tertinggi akibat wabah COVID-19. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas perekonomian Banten dalam menyerap tenaga kerja. Namun demikian meskipun terjadi perbaikan, TPT di Provinsi Banten pada tahun

2024 tetap melebihi rata-rata nasional yang berada pada 4,91% sedangkan Provinsi Banten sebesar 6,68%. Tingginya TPT di Provinsi Banten menjadi ironi karena wilayah tersebut memiliki banyak daerah industri. Bahkan, telah diakui oleh pemerintah sebagai percontohan daerah industri bagi daerah di luar Pulau Jawa.⁵ Kawasan industri ini seharusnya dapat mendorong penyerapan tenaga kerja namun pada kenyataannya angkut TPT Provinsi Banten masih tergolong tinggi.

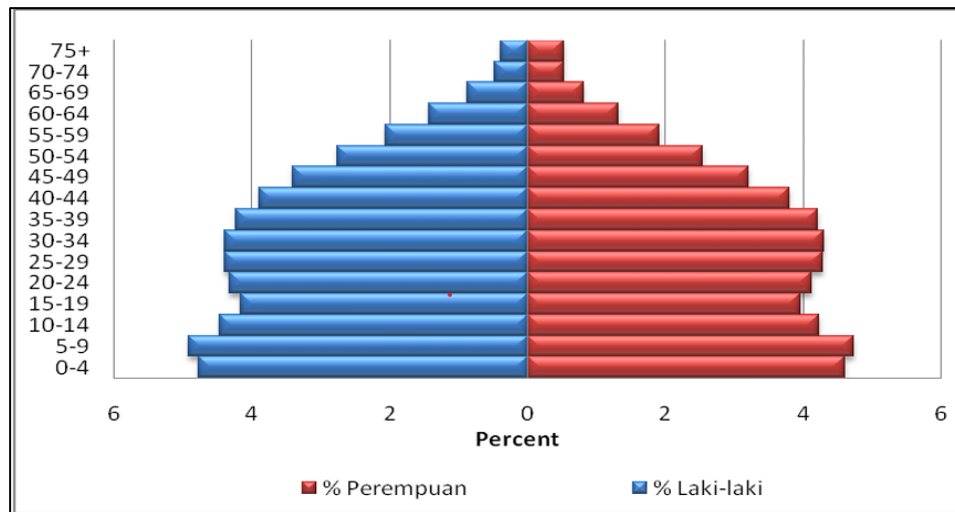
Aspek yang diduga berdampak terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu keberadaan bonus demografi. Bonus demografi adalah kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang hadir akibat perubahan komposisi usia penduduk dalam populasi.⁶ Fenomena bonus demografi muncul saat penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) jumlahnya melebihi dari jumlah penduduk berusia non produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). Bonus demografi bisa diamati melalui bentuk piramida penduduk yang menggambarkan komposisi penduduk sesuai kelompok jenis kelamin dan juga umur.⁷ Jumlah penduduk berada di bagian dasar piramida, sedangkan umur dibagi dalam kelompok lima tahunan, ditampilkan dari yang termuda di bawah hingga yang tertua di atas.

⁵ Nurfauzia, Adinda Saskia, Aftadhea Firda Salvacesa, and Nooriza Shavina Az-Zahra. "Pengaruh Industrialisasi terhadap Migran Masuk Seumur Hidup dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Banten." 2022. <https://www.researchgate.net/publication/36671381>, hlm. 1.

⁶ Agus Yulistiyono, dkk. *Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi* (Insania Team, Juli 2021), hlm. 340.

⁷ Badan Pusat Statistik. *Umur dan Jenis Kelamin Penduduk Indonesia; Sensus Penduduk Tahun 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011), hlm. 9.

Grafik 1.3 Piramida Penduduk Provinsi Banten Tahun 2024



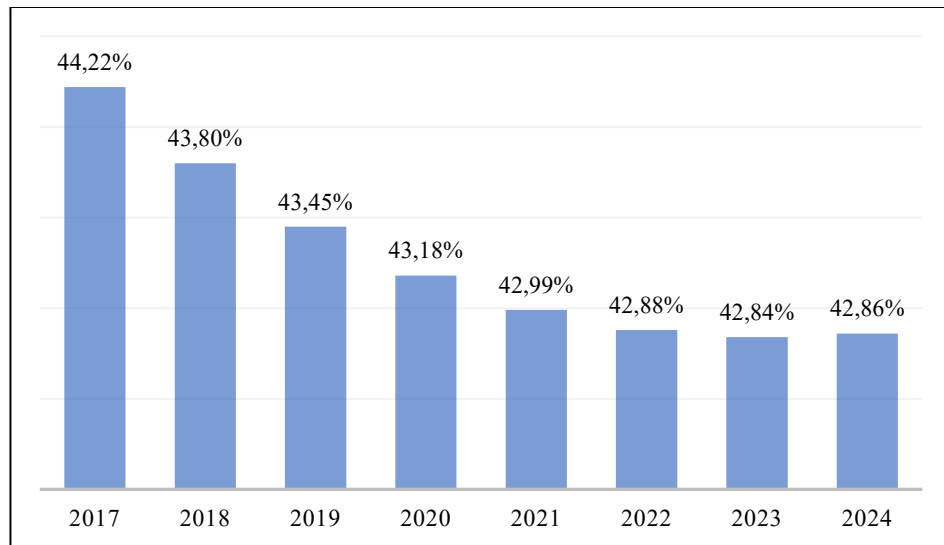
Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Banten 2010 – 2025

Berdasarkan grafik piramida penduduk Provinsi Banten tahun 2024, terlihat bahwa bagian bawah piramida yang melebar menunjukkan tingginya tingkat kelahiran, bagian tengah yang cembung menggambarkan jumlah penduduk usia muda mengalami penurunan dan penduduk usia dewasa mengalami peningkatan, sedangkan bagian atas yang meruncing menandakan angka kematian yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok usia non produktif, baik pada jenis kelamin perempuan atau laki-laki.

Istilah bonus demografi berasal dari konsep dasar demografi yaitu indikator rasio ketergantungan. Rasio ini menggambarkan persentase penduduk yang tergolong memiliki aktivitas konsumtif dan menjadi

tanggungan penduduk berusia 15–64 tahun dianggap sebagai kelompok populasi potensial untuk bekerja.⁸

Grafik 1.4 Bonus Demografi Berdasarkan Rasio Ketergantungan Provinsi Banten Tahun 2017-2024



Sumber: diolah dari Proyeksi Penduduk Provinsi Banten 2010 – 2025

Sesuai grafik rasio ketergantungan Provinsi Banten dari tahun 2017 sampai 2024 mengalami penurunan dari 44,22% menjadi 42,86%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Provinsi Banten sedang berada dalam fase bonus demografi. Rasio ketergantungan yang terus menurun menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah orang yang bergantung secara ekonomi pada penduduk usia produktif. Dalam hal ini, teori Becker menjelaskan bahwa keluarga cenderung memilih jumlah anak yang lebih sedikit namun berkualitas melalui peningkatan investasi pada pendidikan dan kesehatan,

⁸ Badan Pusat Statistik, *Analisis Statistik Sosial: Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2012), hlm. 16.

sehingga mendorong peningkatan kualitas dan proporsi penduduk usia produktif selama periode bonus demografi.⁹

Sejalan dengan itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Armelly, bonus demografi dapat berdampak pada pengangguran karena ketika persentase rasio ketergantungan tinggi, maka jumlah penduduk menganggur akan melebihi dari penduduk yang terserap di pasar tenaga kerja.¹⁰ Situasi ini dapat menyebabkan pekerja menanggung beban ekonomi yang lebih besar karena banyaknya penduduk yang tidak bekerja. Peningkatan angka pengangguran juga dapat terjadi apabila jika tenaga kerja yang terserap rendah, maka jumlah penduduk berusia produktif tidak melakukan pekerjaan akan meningkat. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena menggunakan cakupan nasional sehingga belum mampu mencerminkan kondisi daerah, khususnya Provinsi Banten yang memiliki karakteristik demografi dan ketenagakerjaan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tingkat regional agar dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi nyata mengenai hubungan antara bonus demografi dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

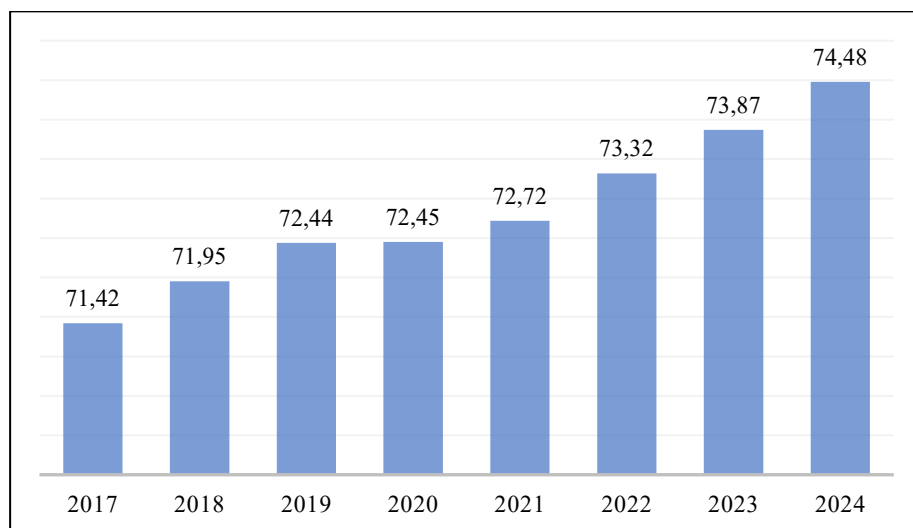
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi TPT. IPM menjadi parameter yang menggambarkan pencapaian program pembangunan dalam bidang sumber daya manusia yang

⁹ Rio Nardo, dkk., *Human Capital Management*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 1.

¹⁰ Defriani Yolanda Utami dan Armelly, "Demographic, Economic, And Human Well-Being: Their Influence On Unemployment Rate Of 34 Provinces In Indonesia," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 12, No. 4. 2023. <https://doi.org/10.1007/s10680-009-9186-x>, hlm. 2359.

digambarkan dalam tingkat ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan yang dapat memicu terjadinya penciptaan lapangan kerja dan mempengaruhi angka pengangguran. Tingginya nilai IPM menjelaskan bahwa masyarakat memiliki kemudahan akses terhadap pendidikan, kesejahteraan ekonomi dan kesehatan. Terjadinya peningkatan IPM mencerminkan perbaikan kualitas sumber daya manusia sehingga tenaga kerja menjadi lebih terampil dan juga produktif. Kondisi tersebut bisa menurunkan tingkat pengangguran, meskipun peran pemerintah tetap diperlukan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai.

Grafik 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2017-2024



Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2025

Berdasarkan data pada grafik tersebut, IPM Provinsi Banten cenderung mengalami tren peningkatan hingga pada tahun 2024 sebesar 74,48. Peningkatan IPM ini peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong kesejahteraan

masyarakat. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan semakin membaik. Hal ini dijelaskan oleh teori Mankiw yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia, sehingga tenaga kerja menjadi lebih produktif dan lebih mudah terserap di pasar kerja, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran.¹¹

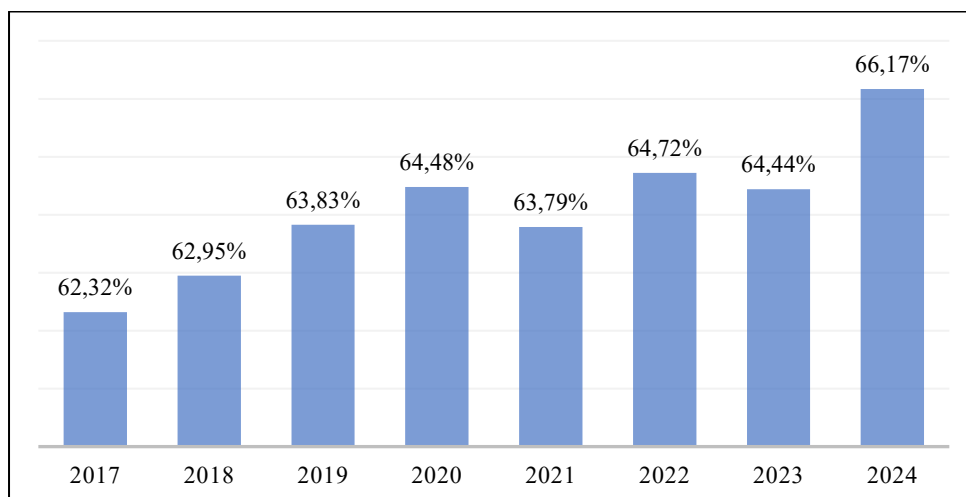
Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan Saputri dan Yefriza, mengungkapkan bahwa tingginya nilai IPM suatu daerah dapat menurunkan tingkat pengangguran, sedangkan jika rendahnya nilai IPM maka tingkat pengangguran di daerah itu cenderung naik.¹² Jadi, tingginya nilai IPM akan berpengaruh pada menurunnya tingkat pengangguran pada suatu daerah. Tetapi, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga belum mampu merepresentasikan kondisi spesifik di daerah lain. Hal ini terutama berlaku pada Provinsi Banten yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan analisis pada Provinsi Banten, maka dapat memberikan gambaran yang lebih sesuai dengan kondisi nyata mengenai IPM yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka.

¹¹ N. Gregory Mankiw. *Principles of Economics, Ninth Edition*. (USA: Cengage, 2021), hlm. 516.

¹² Selvi Saputri dan Yefriza. "Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Provinsi Kepulauan Riau". *Jurnal Darma Agung*, Vol. 3 No. 1. 2025. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/4836>, hlm. 188 .

Faktor yang juga mempengaruhi TPT yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Parameter penting untuk mengukur keterlibatan populasi suatu wilayah dalam aktivitas ekonomi terutama dalam hal mencari suatu pekerjaan. Sedangkan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase penduduk berusia kerja dalam angkatan kerja.¹³ TPAK berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar penduduk berpotensi untuk bekerja.

Grafik 1.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten 2017-2024



Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2025

Menurut grafik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten menunjukkan tren yang meningkat secara umum. Meskipun sempat mengalami penurunan sedikit pada tahun 2021 dengan persentase 63,79% yang disebabkan oleh dampak pasca wabah COVID-19 dan mengalami peningkatan tahun 2022 dengan persentase 64,72%. Namun, pada tahun 2023 menurun kembali dengan persentase 64,44%. Hal ini disebabkan oleh tekanan

¹³ Badan Pusat Statistik. *Booklet Sakernas*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik: 2021), hlm. 3

ekonomi akibat rendahnya pendapatan rumah tangga berkurang karena perempuan kembali menjalankan tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga. Rendahnya nilai TPAK yang mencerminkan terbatasnya ketersediaan pekerjaan bagi penduduk usia kerja, sedangkan tingginya nilai TPAK menjelaskan semakin besar ketersediaan pekerjaan. Penurunan nilai TPAK ini berakibat meningkatnya jumlah pengangguran maka persentase pengangguran (TPT) akan meningkat. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh Lewis yang menyatakan bahwa negara berkembang umumnya memiliki surplus tenaga kerja di sektor tradisional dengan produktivitas rendah, yang dapat dialihkan ke sektor modern yang lebih produktif.¹⁴ Pengalihan tenaga kerja untuk mengoptimalkan surplus tenaga kerja akan meningkatkan output, mempercepat akumulasi modal, serta memperluas kesempatan kerja.

Pernyataan tersebut selaras terhadap temuan penelitian yang dianalisis oleh Putra dan Hidayah, menunjukkan TPAK berpengaruh terhadap pengangguran terbuka, artinya peningkatan TPAK akan menurunkan pengangguran terbuka sedangkan jika TPAK rendah maka pengangguran terbuka cenderung meningkat.¹⁵ Namun, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga

¹⁴ Fitri Amalia, dkk., *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 232.

¹⁵ Ghora Vira Handy Putra dan Nur Hidayah. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pengangguran Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021". *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol. 4, No. 1. 2023. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/komitmen/article/view/23731/8556>, hlm. 155.

belum mampu merepresentasikan kondisi di daerah lain, terutama Provinsi Banten yang memiliki karakteristik ketenagakerjaan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan memfokuskan analisis pada Provinsi Banten yang diharapkan dapat menjelaskan lebih luas mengenai TPAK yang berdampak pada Tingkat Pengangguran Terbuka.

Nilai TPT Provinsi Banten tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Situasi seperti ini memperlihatkan Provinsi Banten memiliki permasalahan pengangguran terbuka yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Pada penelitian sebelumnya juga hanya berfokus pada satu atau dua aspek saja, maka penelitian ini menggabungkan tiga aspek yaitu bonus demografi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Ketiga faktor tersebut memiliki keterkaitan terhadap ketergantungan terhadap usia produktif, kualitas sumber daya manusia, serta seberapa besar masyarakat usia kerja berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja secara aktif yang dapat meningkatkan jumlah pengangguran terbuka. Selain itu, pemilihan ketiga variabel tersebut didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap dan konsisten di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten, sehingga mendukung analisis yang lebih menyeluruh dan akurat selama tahun 2017 – 2024. Dengan demikian, penulis ingin meneliti fenomena tersebut dengan judul **“Dampak Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada penjelasan persoalan di atas, masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meskipun di Indonesia Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan tren menurun, Provinsi Banten masih mempunyai nilai TPT melebihi rata-rata nasional.
2. Provinsi Banten memiliki banyak kawasan industri yang seharusnya mampu menyerap tenaga kerja, namun kenyataannya Tingkat Pengangguran Terbuka masih tergolong tinggi.
3. Bonus demografi dapat memberikan peluang dan tantangan terhadap nilai TPT di Provinsi Banten, tergantung pada sejauh mana penduduk usia produktif dapat diterima dan dimanfaatkan di pasar kerja.
4. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten mendapati pertumbuhan setiap tahunnya, hal ini dapat berdampak pada persentase Tingkat Pengangguran Terbuka.
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten mengalami fluktuasi, fenomena ini berpotensi mempengaruhi naik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.
6. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung hanya meneliti satu atau dua faktor penyebab pengangguran terbuka, sedangkan keterkaitan antara bonus demografi, IPM, dan TPAK secara bersamaan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten belum banyak dikaji lebih detail.

C. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan latar belakang masalah sebelumnya, dapat dirumuskan rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara simultan berdampak terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten?
2. Apakah terdapat dampak Bonus Demografi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten?
3. Apakah terdapat dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten?
4. Apakah terdapat dampak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten?

D. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah pada penjelasan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk menguji dampak Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten.
2. Untuk menguji dampak Bonus Demografi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten.

3. Untuk menguji dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten.
4. Untuk menguji dampak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diarahkan untuk menyampaikan kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Kajian penelitian ini bertujuan untuk menguraikan informasi dan pemahaman mengenai Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten selama periode 2017–2024. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat dalam kegiatan sehari-hari, terutama yang terkait dengan pengangguran, bonus demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

2. Bagi Pemerintah

Kajian ini dapat berfungsi sebagai bahan referensi bagi pemerintah Provinsi Banten untuk menetapkan langkah strategis pembangunan yang berfokus pada pengembangan mutu sumber daya manusia dan menyediakan kesempatan kerja produktif berdasarkan informasi mengenai Pengaruh Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

3. Bagi Pemodal, Pelaku Usaha dan Kegiatan Industri

a. Bagi Pemodal

Penelitian ini menyampaikan gambaran yang penting bagi pemodal untuk menilai peluang dan risiko investasi serta menentukan lokasi dan jenis usaha yang tepat di Provinsi Banten.

b. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, penelitian ini membantu merancang strategi perekrutan tenaga kerja yang efektif dan memilih lokasi usaha yang optimal sesuai kondisi pasar.

c. Bagi Kegiatan Industri

Penelitian ini bermanfaat bagi kegiatan industri sebagai dasar pengembangan kompetensi tenaga kerja serta penyesuaian kegiatan industri dengan potensi dan kualitas sumber daya manusia di daerah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian ini tetap terukur dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, perlu hadirnya ruang lingkup penelitian yang menjadi acuan pembahasan. Ruang lingkup penelitian ini mencakup sejumlah aspek antara lain:

- a. Pada kajian penelitian ini termasuk dalam bidang ekonomi, khususnya mengenai dampak Bonus Demografi, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

- b. Objek penelitian difokuskan pada Provinsi Banten pada periode 2017– 2024 yang mempunyai nilai TPT melebihi rata-rata nasional.
- c. Pada kajian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten serta sumber resmi lainnya.
- d. Variabel bebas dalam kajian penelitian ini yaitu Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sedangkan variabel terikat adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
- e. Pada kajian penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel, yaitu teknik yang memadukan data cross section dan data time series.

2. Keterbatasan Penelitian

Meskipun telah dikerjakan secara maksimal, tetapi penelitian ini mempunyai sejumlah keterbatasan, yaitu:

- a. Penelitian ini hanya membahas tiga variabel utama, yaitu Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), tanpa meneliti variabel ekonomi lainnya seperti kebijakan pemerintah, tingkat upah, investasi, maupun pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

- b. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Provinsi Banten, sehingga hasil penelitian tidak dapat diaplikasikan secara langsung pada provinsi lain di Indonesia.
- c. Periode pengamatan yang digunakan dibatasi pada tahun 2017–2024, sesuai dengan ketersediaan data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- d. Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam penelitian dengan metode analisis regresi data panel, sehingga hasil penelitian difokuskan pada hubungan antar variabel secara statistik tanpa menelaah faktor-faktor kualitatif.
- e. Data yang diterapkan terbatas pada data sekunder dari terbitan resmi BPS dan sumber-sumber relevan lainnya yang telah diverifikasi kebenarannya.

G. Penegasan Variabel

Penegasan variabel dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai konsep yang digunakan serta untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan. Adapun variabel independen (X) yang terdapat dalam penelitian ini yaitu X_1 sebagai bonus demografi, X_2 sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan X_3 sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sedangkan, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

1. Definisi Konseptual

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka yaitu situasi ketika seseorang secara aktif berupaya mencari pekerjaan namun gagal mendapatkan pekerjaan yang sesuai.¹⁶ Pengangguran terbuka mencakup beberapa kelompok, yaitu kelompok yang tidak memiliki pekerjaan serta tengah berupaya mencari pekerjaan, kelompok yang belum bekerja namun tengah menyiapkan sebuah usaha, kelompok yang tidak melakukan pekerjaan serta tidak aktif mencari sebuah pekerjaan karena berpendapat tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh posisi kerja, serta kelompok yang sebenarnya mendapatkan sebuah posisi kerja namun belum mengawali pekerjaan.¹⁷

b. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang hadir akibat perubahan komposisi usia penduduk dalam populasi.¹⁸ Fenomena bonus demografi muncul saat penduduk usia yang produktif (15-64 tahun) melebihi jumlah penduduk usia yang non produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). Istilah bonus demografi berasal dari konsep dasar demografi

¹⁶ Zul Fadli, dkk., *Ekonomi Makro: Teori-Teori Pengantar* (CV. Gita Lentera, 2023), hlm. 8.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, diakses 26 Januari 2025, <https://www.archive.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1>. accessed January 10, 2024, <https://www.archive.bps.go.id/>.

¹⁸ Agus Yulistiyono, dkk. *Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi* (Insania Team, Juli 2021), hlm. 340.

yaitu indikator rasio ketergantungan. Rasio ini menggambarkan persentase penduduk yang memiliki aktivitas konsumtif dan menjadi tanggungan penduduk dengan posisi rentang usia 15–64 tahun yang dianggap kelompok populasi yang potensi untuk bekerja.¹⁹

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yaitu parameter pembangunan ekonomi dan sosial yang menggabungkan kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita.²⁰ IPM menggambarkan sejauh mana masyarakat mampu menikmati hasil pembangunan, khususnya dalam aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ketika IPM mengalami peningkatan maka mencerminkan pencapaian pembangunan dalam lingkup ekonomi.

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angkatan kerja yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) yang sedang bekerja atau sementara tidak melakukan kegiatan bekerja namun memiliki pekerjaan, dan pengangguran.²¹ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah pengukuran yang digunakan untuk menghitung seberapa besar

¹⁹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas: Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020–2050* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2023), hlm. 7.

²⁰ A. Jajang W. Mahri, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam, Edisi Pertama* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), hlm. 299.

²¹ Lestari Aguslim, *Perencanaan Ketenagakerjaan: Upaya Pengentasan Pengangguran di Provinsi Banten* (Bojonegoro: Madza Media, 2021), hlm. 15.

partisipasi tenaga pekerja yang berperan aktif dalam proses ekonomi. Peningkatan nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja akan meningkatkan jumlah penduduk yang melakukan pekerjaan dan penduduk sedang aktif mencari suatu pekerjaan.

2. Definisi Operasional

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah parameter yang menggambarkan banyaknya pengangguran terhadap total angkatan kerja. TPT yang diterapkan terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten dinyatakan ke dalam satuan persen (%) setiap tahun selama periode 2017–2024.

b. Bonus Demografi

Variabel bonus demografi menggambarkan situasi ketika banyaknya penduduk usia produktif melebihi penduduk usia nonproduktif di Provinsi Banten selama periode 2017–2024. Indikator yang digunakan untuk mengukur bonus demografi yaitu rasio ketergantungan dalam bentuk persentase (%) yang merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Data rasio ketergantungan ini didapatkan dari terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan mutu sumber daya manusia di Provinsi Banten setiap tahun selama periode 2017–2024. IPM diukur menggunakan tiga indikator utama, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Data IPM tahunan Provinsi Banten disajikan dalam bentuk skala rasio dan didapatkan dari terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencerminkan banyaknya penduduk usia produktif yang ikut serta dalam kegiatan ekonomi di Provinsi Banten setiap tahun selama periode 2017–2024. Indikator yang digunakan adalah proporsi angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Data TPAK tahunan Provinsi Banten disajikan dalam bentuk persentase (%) dan bersumber dari terbitan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup bagian yang saling terkait, diawali dengan latar belakang masalah yang menerangkan latar belakang dan alasan dilakukannya penelitian. Kemudian, terdapat identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Selanjutnya, ruang lingkup dan

keterbatasan penelitian serta penegasan. Terakhir, sistematika pembahasan menguraikan susunan dan alur pembahasan hasil analisis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini menerangkan dari beberapa bagian membahas konsep-konsep yang mendasari penelitian ini. Bagian pertama adalah teori yang terkait dengan penelitian seperti teori Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Demografi. Selanjutnya, membahas teori yang berkaitan dengan variabel seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan menjelaskan hubungan antar variabel X dan Y. Bagian berikutnya adalah tinjauan penelitian sebelumnya dan kerangka teori. Terakhir, bagian hipotesis penelitian menyajikan dugaan sementara mengenai apakah terdapat dampak antar variabel yang diteliti dan yang dianalisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Selanjutnya, bagian populasi, sampling dan sampel penelitian. Kemudian, pada bagian sumber data, variabel dan skala pengukuran. Terakhir, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bagian ini membahas hasil penelitian, yang mencakup deskripsi data dan pengujian hipotesis serta membahas temuan penelitian sebagai hasil utama yang diperoleh.

BAB V : PEMBAHASAN

Bagian ini diarahkan untuk menjawab masalah penelitian dan menunjukkan bahwa tujuan telah tercapai. Kemudian, temuan penelitian dijelaskan dengan bantuan teori-teori yang relevan.

BAB VI : PENUTUP

Bagian ini mencakup bagian pertama adalah kesimpulan, yang menyajikan jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian serta menegaskan hasil pengujian hipotesis yang sudah dilaksanakan. Bagian kedua adalah saran, yang memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.